

PARTAI POLITIK DAN KEBIJAKAN PERBURUHAN

(Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Dalam
Perumusan Kebijakan Perburuhan di DKI Jakarta Periode 2015 - 2017)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
(S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik dengan Peminatan Inovasi Pemerintahan**

Oleh:
ROY RAMADHANA
NIM. 135120607111056



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2018

**PARTAI POLITIK DAN KEBIJAKAN PERBURUHAN
(STUDI PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DKI
JAKARTA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERBURUHAN DI DKI
JAKARTA PERIODE 2015 - 2017)**

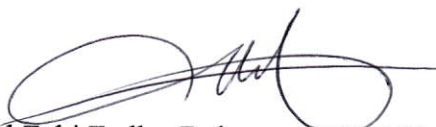
SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Roy Ramadhana
NIM.135120607111056**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
NIP. -

Tanggal: 09 Januari 2018



Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
NIP. 2014058609212001

Tanggal: 09 Januari 2018

**PARTAI POLITIK DAN KEBIJAKAN PERBURUHAN
(STUDI PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DKI
JAKARTA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERBURUHAN DI DKI
JAKARTA PERIODE 2015 - 2017)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Roy Ramadhana
NIM.135120607111056**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik
pada tanggal 02 Januari 2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji



Fathur Rahman, S.IP., MA
NIP. 2011098204291001

Sekretaris Majelis Penguji



Tia Subekti, S.IP., MA
NIP. -

Anggota Majelis Penguji 1



Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
NIP. -

Anggota Majelis Penguji 2



Ratnaningsih Damayanti, S.IP.,
M.Ec.Dev
NIP. 2014058609212001

Malang, 09 Januari 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unta Ludigdo, S.E., M.SI., Ak.
NIP. 196903141994021001

PERNYATAAN

Nama: Roy Ramadhana
NIM: 135120607111056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Partai Politik dan Kebijakan Perburuhan (Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Perburuhan di DKI Jakarta Periode 2015 - 2017)** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 10 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,




Roy Ramadhana
NIM.135120607111056

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang khususnya kepada kedua orang tua Ibu Rosmiati Sembiring dan Bapak Linder Tarigan yang selama ini telah membimbing, mengajarkan dan memberikan doa terus-menerus tanpa henti, juga kepada kakak saya Arryando Sanjaya yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Serta almarhumah adik tersayang semoga ditempatkan di Surga terindah Allah SWT. Mereka adalah sumber doa-doa saya dan keluarga yang selalu memberi dukungan lahir dan batin. Semoga saya dapat menjadi manusia yang dibanggakan dan bermanfaat bagi kehidupan mereka dan orang lain.

-Roy Ramadhana, 2018-

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Partai Politik dan Kebijakan Perburuhan (Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Perburuhan di DKI Jakarta Periode 2015 - 2017)”***.

Penelitian skripsi ini mendasarkan pada kajian peran partai politik dalam perumusan kebijakan publik. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang turut membantu. Baik berupa saran, bimbingan serta dorongan semangat selama proses penulisan, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan selalu mencurahkan cinta kasih-Nya serta memberikan ridho-Nya sehingga penulis masih dapat merasakan kenikmatan hidup hingga saat ini.
2. Junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada penulis sehingga engkau menjadi panutan hidup untuk mengarungi kehidupan ini.
3. Kedua orang tua yang teramat penulis cintai dan hormati, Mamah tercinta Rosmiati Sembiring, terimakasih untuk doa yang selalu engkau selipkan dalam setiap sujudmu, terimakasih untuk selalu mengingatkan dan memberikan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Bapak terkasih Linder Tarigan, terimakasih untuk setiap doa dan seluruh peluh dan tetesan keringat yang engkau keluarkan dalam perjuanganmu memberikan kebahagiaan dalam keluarga ini. *Alhamdulillah*.
4. Kakak Arryando Sanjaya, S.I.Kom. Terimakasih atas segala motivasi dan dukunganmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar yang juga turut memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi.

6. Bapak Joko Purnomo S.IP., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA selaku dosen pembimbing atas segala bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev selaku dosen pembimbing atas segala bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Fathur Rahman, S.IP., MA selaku dosen penguji atas segala ide, saran dan kritiknya yang membangun membuat penulis belajar untuk memperbaiki tulisan menjadi lebih baik.
10. Ibu Tia Subekti, S.IP., MA selaku dosen penguji atas segala ide, saran dan kritiknya yang membangun membuat penulis belajar untuk memperbaiki tulisan menjadi lebih baik.
11. Seluruh dosen serta karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya.
12. Seluruh pihak narasumber yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk penulis dalam mendapatkan informasi data di lapangan untuk kelengkapan data skripsi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Wakil Ketua Komisi A DPRD Prov. DKI Jakarta yakni Bapak William Yani, SH,CLA, Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI-P DKI Jakarta Bapak Ridar Handoko, Ketua PAC PDI-P Kec. Pademangan Bapak Hasto Widodo, Ketua PAC PDI-P Kec. Pulogadung Bapak Jamhari, Waka I Pemenangan Pemilu PAC PDI-P Kec. Pulogadung Ibu Suyanti, S.Sos, Ketua Ranting PDI-P Kel. Cipinang Bung Riki Novarlia, Ketua Ranting PDI-P Kel. Jati Ibu Mar Yuniarti, Korwil KSBSI DKI Jakarta Bung Dwi Harto. Lalu pihak Disnakertrans Prov. DKI Jakarta Ibu Hermawati selaku Kabid Industri dan Kesejahteraan Pekerja, Bapak Anton Waruwu selaku Kepala Mediator dan Bapak Nur Kholis, ST selaku Pengawasan Ketenagakerjaan.
13. Bapak Fredy Sembiring selaku Ketua Federasi PPMI KSPSI, terima kasih atas ketersediannya untuk wawancara dan bantuannya kepada penulis sehingga dapat mewawancarai beberapa narasumber lainnya.
14. Kepada seluruh teman-teman IPM-C 2013 yang selalu memberikan dukungan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
15. Kawan-kawan penulis. Diksa, Nurcahyo, Dhafir, Iwan, Husnul, Deni, Tyo, Fairuz, Oky, Rezha, Asti serta seluruh teman-teman penulis di Kota Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih selalu memberikan dorongan dan semangat yang besar kepada penulis.

16. Sahabat-sahabat penulis di Jakarta Suwadi Abla, Avrian, Gunawan, Abdurrahman Qlay, Feby Ramadhan, Yoga Pradana, Dealita A, Rio Mawardi, Aldi, Luthfi, Widi, Bayu. Geng SMPN 219 Ragil, Nizar, Icha, Maya. Terima kasih selalu memberikan dorongan dan semangat serta telah mengisi hari-hari penulis saat proses penulisan skripsi ini.
17. Sahabat sejati, Adhe Supri yang membantu dan menemani penulis di kala melakukan proses penelitian, terima kasih semoga Allah SWT membalas budi baikmu. Serta Adik sepupu Radithsan A.R Tarigan yang selalu ada dan menjadi teman diskusi penulis.
18. Orang-orang baru yang telah datang dan hadir di kala penulis melakukan penyelesaian skripsi ini. Tidak perlu penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah sempat hadir mengisi hari dan memberikan warna dalam hidup saya.
19. Terakhir kepada teman-teman terbaik di Ilmu Pemerintahan FISIB UB, terimakasih atas semua dukungan dan pengalaman yang kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf kepada semua pihak apabila terjadi kesalahan. Harapan penulis semoga laporan hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 10 Januari 2018

Penulis

ABSTRAK

Roy Ramadhana, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2018. “Partai Politik dan Kebijakan Perburuhan (Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Perburuhan di DKI Jakarta Periode 2015 - 2017).

Dosen Pembimbing: Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP, MA dan Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev

Partai politik sejatinya memiliki peran yang cukup penting dalam proses perumusan suatu kebijakan pemerintah, hal ini tentu menjadi salah satu fungsi yang melekat pada sebuah organisasi partai politik. Penelitian ini berfokus pada peran PDI-P DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan perburuhan di DKI Jakarta. Isu-isu mengenai perburuhan sendiri, menjadi sebuah isu yang cukup strategis dan populis dalam kehidupan politik di Indonesia. PDI-P, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia memiliki fokus yang cukup besar terhadap persoalan perburuhan dan juga memiliki kedekatan secara ideologi serta nilai-nilai perjuangan dengan kaum buruh di Indonesia. Atas dasar itu, dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauhmana peran dari PDI-P khususnya PDI-P DKI Jakarta dalam memperjuangkan kehidupan perburuhan di DKI Jakarta melalui perumusan kebijakan di pemerintah. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori yang dimiliki oleh Richard Katz dan Peter Mair tentang tiga wajah organisasi partai yang terdiri dari organisasi partai tingkat akar rumput, organisasi partai tingkat pusat dan organisasi partai di tingkat jabatan publik. Dari teori tersebut selanjutnya ditinjau sejauhmana PDI-P DKI Jakarta melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, sehingga dapat memunculkan tawaran-tawaran kebijakan mengenai perburuhan di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajah organisasi PDI-P DKI Jakarta pada tingkat akar rumput dan ditingkat kantor pusat masih lemah dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan mengenai persoalan buruh, sehingga tidak adanya usulan kebijakan mengenai perburuhan yang muncul. Usulan kebijakan yang ada, praktis hanya berasal dari inisiatif organisasi PDI-P DKI Jakarta di tingkat jabatan publik yaitu mendorong revisi Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang aturan waktu kerja bagi ibu hamil.

Kata kunci: *PDI-P, Kebijakan Perburuhan, Tiga wajah organisasi partai*

ABSTRACT

Roy Ramadhana, Governance Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya, 2018. "Political Parties and Labor Policy (Study Role of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta in Labor Policy Formulation in Jakarta Period 2015 - 2017).

Advisors: Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP, MA and Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev

Political parties actually has an important role in the process of formulating a government policy, it would be one inherent function of a political party organization. This study focuses on the role of PDI-P Jakarta in the formulation of labor policy in Jakarta. Labor issues of its own, becoming a strategic issue and populist political life in Indonesia. PDI-P, as one of the major political parties in Indonesia have large enough focus on labor issues and also has close ideological and values of the struggle by the workers in Indonesia. On that basis, in the context of this study aims to measure the extent of the role of the PDI-P in particular PDI-P Jakarta in the fight for labor life in Jakarta through the formulation of government policy. This study examined using theory that are owned by Richard Katz and Peter Mair on the three faces of the party organization comprising grassroots level party organizations, party organization in central office and the party organization at the public office. The theory further in terms of the extent of the PDI-P Jakarta carry out the functions of articulation and aggregation of interests, so as to raise the bids on labor policy in Jakarta. The method used is descriptive qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that organizations face PDI-P Jakarta at the grassroots level and central office level are still weak in the articulation and aggregation of interests on labor issues, so it is not their policy proposals regarding labor appears. policy proposals, practically only from organizational initiatives PDI-P Jakarta at the level of public office which is to encourage the revision of Regulation DKI Jakarta No. 6 of 2004 about Employment and proposed regional regulation on working time rules for pregnant women.

Keywords: *PDI-P, Labor Policy, Three face of party organizations.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Kajian Teori	22
2.2.1 Teori Tiga Wajah Organisasi Partai	22
2.2.2 Fungsi Artikulasi dan Agregasi Partai Politik	27
2.2.3 Tiga Wajah Organisasi Partai Dalam Perumusan Kebijakan	29
2.3 Alur Pikir Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian	35
3.3 Jenis Data	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4.1 Wawancara	38
3.4.2 Observasi	40
3.4.3 Studi Pustaka	40
3.4.4 Dokumentasi	41
3.5 Teknik Analisis Data	42
BAB IV PDI-P DAN KEBIJAKAN PERBURUHAN DI DKI JAKARTA	45
4.1 Posisi PDI-P Dalam Politik Perburuhan di Indonesia	45
4.1.1 Kebijakan Perburuhan Era Reformasi	48
4.2 Kebijakan Perburuhan DKI Jakarta	53
4.2.1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja	56
4.2.2 Upah Minimum Provinsi	62

4.2.3 Upah Minimum Sektoral Provinsi.....	66
4.2.4 Perlindungan Kerja.....	67
4.2.5 Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi	69
4.2.6 Sistem <i>Outsourcing</i> dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	71
BAB V PERAN PDI-P PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERBURUHAN DI DKI JAKARTA.....	74
5.1 Peran Organisasi Akar Rumput PDI-P DKI Jakarta	75
5.1.1 Artikulasi Kepentingan Melalui Agenda Reses Anggota DPRD PDI-P.....	79
5.2 Peran Organisasi DPD PDI-P DKI Jakarta	82
5.2.1 Proses Artikulasi Kepentingan Oleh DPD PDI-P DKI Jakarta.....	84
5.2.2 Proses Agregasi Kepentingan Oleh DPD PDI-P DKI Jakarta	88
5.2.3 Bantuan Hukum Kepada Buruh di DKI Jakarta	91
5.2.4 Pengawasan Kebijakan UMP di DKI Jakarta	93
5.3 Peran Organisasi PDI-P DKI Jakarta di Tingkat Jabatan Publik	95
5.3.1 Mendorong Revisi Perda Ketenagakerjaan	96
5.3.2 Usulan Perda Tentang Waktu Kerja Bagi Ibu Hamil	98
5.4 PDI-P dan Organisasi Buruh DKI Jakarta.....	99
BAB VI PENUTUP	104
6.1 Kesimpulan.....	104
6.2 Rekomendasi	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta 2010 – 2015.....	4
Tabel 1.2 Sepuluh Kota Dengan Biaya Hidup Tertinggi di Indonesia	5
Tabel 1.3 Perolehan Kursi DPRD DKI Jakarta Periode 2014 – 2019	10
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara.....	39
Tabel 4.1 Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran	48
Tabel 4.2 Daftar Konvensi ILO	50
Tabel 4.3 Jumlah Perusahaan Sektor Mikro, Kecil, Menengah dan Besar DKI Jakarta	55
Tabel 4.4 Iuran JKK Menurut Kelompok Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	58
Tabel 5.1 Daftar Bidang di DPD PDI-P Provinsi DKI Jakarta	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Tiga Wajah Organisasi Partai Politik.....	26
Bagan 2.2 Alur Pikir Penelitian	33
Bagan 3.1 Alur Analisis Data	43
Bagan 4.1 Persebaran Pekerja/Buruh di DKI Jakarta Tahun 2017	54
Bagan 5.1 Peran Organisasi PDI-P Tingkat Akar Rumput Dalam Masa Reses	81

DAFTAR ISTILAH

Advokasi	: Merupakan suatu usaha untuk membantu mempengaruhi terjadinya perubahan dalam kebijakan secara bertahap maju.
Agregasi Kepentingan	: Cara bagaimana tuntutan-tuntutan atau aspirasi yang dilancarkan oleh kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.
Akar Rumput	: Orang atau masyarakat di tingkat lokal (paling dasar) tingkat daripada di pusat nasional kegiatan politik.
Artikulasi Kepentingan	: Suatu proses penyerapan berbagai kebutuhan, tuntutan atau aspirasi dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar aspirasi kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah.
Bipartit	: Perundingan antara pekerja/buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Buruh	: Mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis, di Indonesia sebutan buruh biasanya digunakan untuk orang yang bekerja di wilayah-wilayah “kasar” seperti pekerja bangunan, penjaga toko dan pekerja yang bekerja di pabrik.
Fasilitator	: Seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu membuat rencana guna mencapai tujuan.
Fungsionalis Struktural	: Sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.
Isu-isu Populis	: Filsafat politik yang berpihak pada hak-hak dan kepentingan orang banyak.
Jabatan Publik	: Orang-orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Jaminan Sosial	: Salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan layak.
Konstituen	: Anggota atau masyarakat pendukung suatu partai politik.
Manifesto	: Pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok.
Marjinal	: Adalah identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan
Masa Reses	: Masa dimana anggota DPR atau DPRD (legislatif) melakukan kegiatan diluar masa sidang. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan atau konstituennya.
Mediator	: Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
Memformulasikan	: Merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.
<i>Outsourcing</i>	: Pekerja atau karyawan kontrak yang berasal dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
Pembangunan	: Proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.
PHK	: Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.
Ratifikasi	: Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya.
Simpatisan Partai	: Orang yang bersimpati atau mendukung (salah satu) partai politik.
<i>Stakeholder</i>	: Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas suatu organisasi.
Tekor	: Kurang atau mengalami kerugian dalam hal pembayaran, anggaran belanja dan sebagainya.

Tenaga Kerja	: Merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja yang dapat bekerja pada wilayah kerja “ <i>profesional</i> ” ataupun pada wilayah kerja “ <i>kasar</i> ”.
Tripartit	: Forum komunikasi dan konsultasi antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan antara serikat buruh dan pengusaha.
Urbanisasi	: Perpindahan penduduk dari desa ke kota.
<i>Wong Cilik</i>	: Sebuah penyebutan golongan masyarakat yang identik dengan rakyat kecil atau pra-sejahtera.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
Dapil	: Daerah Pemilihan
Disnakertrans	: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
JSHK	: Jaminan Sosial Hubungan Kerja
JTH	: Jaminan Hari Tua
Kabid	: Kepala Bidang
KJP	: Kartu Jakarta Pintar
KJS	: Kartu Jakarta Sehat
Korwil	: Kordinator Wilayah
KSBSI	: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
KSPSI	: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
MOU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>

PAC	: Pimpinan Anak Cabang
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Prolegda	: Program Legislasi Daerah
Rakercab	: Rapat Kerja Cabang
Rakerda	: Rapat Kerja Daerah
Rakorbid	: Rapat Kordinasi Bidang
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UMSP	: Upah Minimum Sektoral Provinsi